

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. Hukum dan penelitian hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ferry, Ahmad Nindra. Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar, Perpustakaan Unhas, Makassar, 2002.
- Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012,
- Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984:47
- Makara, M. Taufik, 2005, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum, Yuridika, 2001.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984.

Soerodibroto, R. Soenarto, KUHP & KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Wijaya, Andika. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### **Website**

Moda Transportasi atau sejarah transportasi di Dunia Dan Indonesia [https://id.wikibooks.org/wiki/Moda\\_Transportasi/Sejarah\\_transportasi](https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi) diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.

Pengaturan Jasa Transportasi Online

<http://www.indotelko.com/kanal?c=bid&it=indonesia-aturan-transportasi-online> diakses pada 2 Oktober 2019

Jasa Transportasi Online yang ada di indonesia dari gojek hingga uber taksi.

<http://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber> diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.

<http://www.sindikat.co.id/blog/order-fiktif-gojek-pelanggaran-perjanjian-kerja-pmh-penipuan> diakses pada tanggal 01 oktober 2019 Jam 15:00 W.I.B.

<http://medan.tribunnews.com/2019/02/14/polisi-ungkap-penipuan-order-fiktif-ojek-online-pelaku-bisa-raup-untung-rp10-juta-per-hari> diakses pada tanggal 02 Oktober 2019 pukul 15:00 W.I.B.

1 <http://lianalindasari.blogspot.com/tips-menghindari-belanja-online.html>, diakses tanggal 03 oktober 2019

1 <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. diunduh pada Rabu 03 Oktober 2019 pada jam 01.00 Wib.

## **Peraturan Perundang-Undang**

1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.
5. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: penyelidikan; pengiriman SPDP; upaya paksa; pemeriksaan; gelar perkara; penyelesaian berkas perkara; penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
8. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik.
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi serta Transaksi Elektronik.